

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu sudah mengalami berbagai perubahan regulasi. Perubahan-perubahan ini adalah bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman standar akuntansi pemerintah sebenarnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah, supaya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan adalah manifestasi dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas dan media informasi akuntansi untuk dapat menyampaikan hasil kinerja manajemen keuangan kepada pihak lain.

Pemerintah melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan.

Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi utamanya, perlu menerapkan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dan pengembangan, terutama di bidang akuntansi pemerintah yang berkelanjutan sehingga terbentuk sistem yang sesuai. Dengan adanya laporan keuangan, baik keuangan pusat dan daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomi, efisien, efektif dan akuntabel. Keberadaan laporan keuangan ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai kewajiban tanpa menjadikan keuangan sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayah.

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditingkatkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan refleksi untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik yang relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami (PP No. 71 tahun 2010), sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang berkualitas dan bermanfaat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menerima evaluasi dalam bentuk pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD, itu berarti

bahwa dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara adil dan berkualitas. Ada empat pendapat yang diberikan oleh pemeriksa, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Penolakan dan Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil diunduh dari internet, ternyata dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang tidak sesuai. Selain itu, masih banyak penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah. Seperti tulisan-tulisan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang M Jauhari Mahmud sebelumnya memaparkan 9 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang terkemas dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017. Dimana menurutnya, 9 temuan yang dimaksud tersebut merupakan hasil pemeriksaan atas dasar standar penilaian internal (SPI). Tak hanya temuan-temuan itu, BPK pun menemukan sekitar 8 temuan yang masuk kategori tidak patuh terhadap perundang-undangan.

Ada beberapa kelebihan pembayaran yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Sebagai contoh di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olah Raga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang. Di dinas tersebut, terdapat temuan kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru yang besarnya mencapai sekitar Rp 90.177.785. Kelebihan pembayaran tersebut juga terjadi pada kegiatan belanja modal di 6 OPD Kabupaten Semarang. Totalnya mencapai Rp 230.237.674.89. Perjanjian kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang terkait pemungutan retribusi sampah ternyata juga tidak sesuai ketentuan, Menurutnya, apabila mengarah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010, PDAM hanya bisa mengambil hasil retribusi paling banyak 5 persen. Tetapi pada kenyataan di lapangan dalam kegiatan tersebut, perusahaan terkait justru meminta sebesar 10 persen. Terjadi juga besaran denda keterlambatan pembayaran tagihan klaim 2017 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa Rp 48.275.612 dan Rp 139.505.915 di RSUD Ungaran. Pengelolaan lelang atas garapan tanah eks bengkok juga belum sesuai aturan.

Masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit pembuatan laporan keuangan pemerintah tuntutan masyarakat akan tata pemerintahan yang baik (*governance*) semakin meningkat. Ini juga telah

mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Temuan menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan di mana penerapan SAP yang benar dan pemahaman yang baik tentang akuntansi keuangan daerah oleh manajer keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Prinsip penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik adalah suatu keharusan yang harus diterapkan di semua negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk membuat penerapan standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik, perlu memperkuat sistem dan lembaga berdasarkan hukum dan peraturan. Salah satu upaya untuk mewujudkan penerapan standar transparansi dan akuntabilitas untuk manajemen keuangan Pemerintah adalah diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo kelebihan anggaran dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah akan meningkatkan akuntabilitas

dan keandalan manajer keuangan pemerintah melalui persiapan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah keuntungan dari Sistem Pengendalian Internal pemerintah sendiri. Pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah menetapkan bahwa tujuan SPIP adalah untuk memberikan kepercayaan yang memadai dalam mencapai:

- a. efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan administrasi negara;
- b. keandalan Laporan Keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia di lembaga pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah membuat program/kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kesalahan penyajian laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi informasi keuangan, yaitu; Aditya Sanjaya (2017) bahwa terdapat perbedaan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel atribut kualitas

laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhayati (2015) dengan hasil Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam biro keuangan sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena semakin kuat Penerapan SAP maka semakin bagus kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Harefa (2017) dengan hasil Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan, yang berarti bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah dalam mencatat, meringkas, dan melaporkan akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Irzal Tawaqal & Suparno (2017) dengan hasil Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah, bukti teoritis dari penelitian tentang kualitas pelaporan keuangan dapat ditingkatkan melalui peningkatan sistem akuntansi keuangan daerah dan efektivitas pengendalian internal.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zahrah, et al (2017) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat memberikan pemahaman bahwa kemampuan masing-masing individu diperlukan bersama untuk memberikan hasil terbaik berdasarkan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di dalam penyusunannya mengeluarkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi karena variabel memiliki hasil yang sama di jurnal sebelumnya yang telah diteliti sehingga tidak adanya peluang untuk meneliti kembali. Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya, menambahkan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia di karenakan dalam penelitian masih terjadi hasil yang berbeda sehingga peneliti memiliki peluang untuk menelitinya kembali. Sampel dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di OPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sementara penelitian ini dilakukan di OPD Pemerintah Kota Semarang.

Berdasarkan pendapat para ahli Nurhayati (2015), Tulus Harefa (2017), Irzal Tawaqal & Suparno (2017), dan Siti Zahrah dkk (2017), maka berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah seperangkat prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lainnya yang sistematis untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintah daerah. Lalu menurut Sutrisno (2017) Kompetensi mengartikanya sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikendalikan oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor sebaik mungkin.

1.2 Rumusan Masalah

penyusunannya mengeluarkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi karena variabel memiliki hasil yang sama di penelitian sebelumnya yang telah diteliti sehingga tidak adanya peluang untuk meneliti kembali. Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya, menambahkan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di karenakan dalam penelitian masih terjadi hasil yang berbeda sehingga peneliti memiliki peluang untuk menelitinya kembali. Menurut (Deddi Nordiawan,2010;201) sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, peringkasan, hingga pelaporan keuangan, dalam konteks pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Penelitian ini dilakukan kembali karena terjadi simpang siur hasil penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki peluang untuk melakukan penelitian kembali. Adanya peluang tersebut memicu untuk dilakukan penelitian kembali. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ?
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ?
3. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ?

4. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
2. Menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
3. Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
4. Menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mempelajari Ilmu Ekonomi yaitu Akuntansi Sektor Publik tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Sebagai sumber informasi dan bahan untuk dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan, membantu berkontribusi pada praktik akuntansi di Indonesia di masa mendatang, dan memberikan wawasan dan wacana kepada OPD dalam mengembangkan penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.